

Lampiran 3a | Rencana Strategis 2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional – Kementerian Kehutanan

Program

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan Hutan

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional I										
	Indikator Kinerja Utama		Region al I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN													
Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan													
Kegiatan :													
1. Pengukuhan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan • Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). • Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%. • Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. • Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% 	Km	8.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	750	1.000	300	200
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi • Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) Wilayah KPHK tidak dipisahkan berdasarkan administrasi pemerintahan provinsi • Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 propinsi. • Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) 	Propinsi	8	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
		Propinsi	18	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
		Propinsi	8	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1
		Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional I										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Region al I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri
	sebanyak 4 judul.												
	• Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%.	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	• Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi)	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	• Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	• Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari permohonan	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	• Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%;	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	• Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional I										
	Indikator Kinerja Utama		Region al I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri
	• Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	• Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun)	Satker / tahun	15	1	3	1	1	1	2	1	1	2	2
	• Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang	Orang	199	-	80	-	-	-	79	-	-	14	26
	• Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun)	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional Indikator Kinerja Utama	Satuan	Pusat dan Regional II											
			Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT	
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan :														
1. Pengukuhan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan • Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). • Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%. • Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. • Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% 	Km	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	500	1.250	1.250
		%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi • Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) KPHK tidak dipisahkan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan 	Propinsi	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Propinsi	67	20	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Pusat dan Regional II										
	Indikator Kinerja Utama		Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT
	• Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 propinsi.	Propinsi	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	• Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul.	Judul	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%.	%	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	• Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul	Judul	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi)	Propinsi	-	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	• Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	• Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	Kali	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar	• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari permohonan	%	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	• Wajib bayar tertib membayar PNBP	%	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Pusat dan Regional II										
	Indikator Kinerja Utama		Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT
Kegiatan Kehutanan	Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%;												
	• Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi	Propinsi	-	8	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	• Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	• Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun)	Satker / tahun	6	12	1	1	1	1	1	2	2	1	2
	• Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang	Orang	439	143	-	-	-	-	-	62	64	-	17
	• Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun)	Judul	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul	Judul	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN							
Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan							
Kegiatan :							
1. Pengukuhan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan • Keputusan menunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). • Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%. • Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. • Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% 	Km	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		%	100	100	100	100	100
		%	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi • Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) KPHK tidak dipisahkan berdasarkan administrasi pemerintahan • Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 propinsi. • Peraturan perundang-undangan penyelenggara kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul. • Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%. 	Propinsi	4	1	1	1	1
		Propinsi	10	*)	*)	*)	*)
		Propinsi	4	1	1	1	1
		Judul	-	-	-	-	-
		%	90	90	90	90	90
3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan 	Judul	-	-	-	-	-

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
	penataan ruang sebanyak 4 judul						
	• Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi)	Propinsi	4	1	1	1	1
	• Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	Judul	-	-	-	-	-
4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	• Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Judul	-	-	-	-	-
	• Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	Kali	-	-	-	-	-
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari permohonan	%t	80	80	80	80	80
	• Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%;	%	80	80	80	80	80
	• Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi	Propinsi	4	1	1	1	1
	• Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	Judul	-	-	-	-	-
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	• Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan	Judul	-	-	-	-	-
	• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).	Judul	-	-	-	-	-
	• Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun)	Satker / tahun	9	4	2	1	2
	• Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang	Orang	202	62	84	0	56
	• Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun)	Judul	-	-	-	-	-
	• Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul	Judul	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional IV										
	Indikator Kinerja Utama		Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Goro ntalo	Malu ku	Mik Utara	Papua	Papua Barat
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN													
Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan													
Kegiatan :													
1. Penguikuan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan • Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). • Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%. • Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. • Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% 	KM	7.000	500	750	500	1.000	750	500	500	750	750	1.000
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi 	Propinsi	5	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional IV											
	Indikator Kinerja Utama		Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Goro ntalo	Malu ku	Mlk Utara	Papua	Papua Barat	
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) KPHK tidak dipisahkan berdasarkan administrasi pemerintahan 	Propinsi	19	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 propinsi. 	Propinsi	5	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%. 	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Peretujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi) 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<ul style="list-style-type: none"> Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional IV											
	Indikator Kinerja Utama		Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Goro ntalo	Malu ku	Mlk Utara	Papua	Papua Barat	
	• Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari permohonan	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	• Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%;	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	• Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	• Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	• Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun)	Satker / tahun	17	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
	• Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang	Orang	317	64	12	-	89	-	14	57	-	56	25	
	• Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun)	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional IV										
	Indikator Kinerja Utama		Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Goro ntalo	Malu ku	Mik Utara	Papua	Papua Barat
	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-